



LAPORAN AKHIR

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2025

KATA PENGANTAR

Kinerja demokrasi di Kota Blitar telah berjalan dengan sangat baik dan menunjukkan kematangan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang berhasil mencapai 89,06 poin. Keberhasilan ini tidak hanya menandai tren peningkatan kualitas politik yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya meraih skor 84,37 pada tahun 2023 dan 88,68 pada tahun 2024, tetapi juga secara sukses melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar sebesar 88,69 poin. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seluruh capaian prestisius dan potret perkembangan iklim politik ini berhasil didokumentasikan secara komprehensif dalam publikasi laporan IDI Kota Blitar Tahun 2025.

Kesimpulan positif mengenai kondisi demokrasi tersebut didasarkan pada pengukuran empiris yang objektif terhadap tiga aspek utama, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Data dan informasi statistik di dalam laporan ini diperoleh melalui kompilasi data primer dan sekunder dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara teknis, tim penyusun melakukan pencatatan peristiwa yang berkaitan dengan isu demokrasi sepanjang tahun 2025 dari media *online*, memetakan korespondensinya dengan indikator komposit IDI, kemudian melakukan verifikasi langsung (*cross-check*) dengan dokumen-dokumen resmi yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait melalui FGD.

Sebagai representasi akurat dari dinamika sosial-politik di lapangan, data IDI Kota Blitar Tahun 2025 ini diorientasikan untuk menjadi rujukan dan referensi strategis dalam penyusunan kebijakan publik. Evaluasi berbasis angka ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam program kerja setiap OPD di Kota Blitar demi mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik.

Keberhasilan penyusunan dan penerbitan publikasi ini tidak lepas dari kerja sama, dedikasi, dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Kami sangat mengharapkan masukan, pendapat, serta saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas laporan ini pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan demokrasi di Kota Blitar.

Kepala Bakesbangpol Kota Blitar

Toto Robandiyo S.Sos.,M.Si.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar belakang	4
1.2 Tujuan dan Manfaat	8
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	8
1.4 Sasaran Output	9
1.5 Dasar Hukum	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
2.1 Tinjauan Teoritis tentang Demokrasi	11
2.2 Indeks Demokrasi Indonesia	15
BAB III METODOLOGI	20
3.1 Pendekatan Penelitian	20
3.2 Indikator dan Variabel IDI	22
3.3 Teknik Analisis Data.....	25
3.4 Goodness Kriteria.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Ulasan Peristiwa Penting Di Kota Blitar.....	31
4.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar 2025	35
4.3 Perolehan IDI Berdasarkan Indikator Komposit Masing-Masing Aspek	40
4.3.1 Aspek Kebebasan	42
4.3.2 Aspek Kesenjangan.....	44
4.3.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Simpulan	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen pengukuran yang bersifat fundamental dan strategis dalam memotret sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis serta komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak warga negaranya. Sejak pertama kali digagas sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2023, IDI telah menjadi barometer penting bagi pemerintah pusat melalui kolaborasi lintas instansi seperti Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, dan Kemendagri dalam menyusun kebijakan berbasis data. Namun, dinamika demokrasi Indonesia terus mengalami evolusi yang menuntut adanya penyempurnaan alat ukur, yang kemudian diwujudkan melalui Naskah Akademik penyusunan IDI tahun 2022. Metodologi baru ini tidak lagi hanya melihat demokrasi dari kacamata prosedural semata, melainkan lebih dalam menyentuh aspek substansial yang mencakup kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Pengukuran ini menjadi sangat krusial di tingkat daerah karena sering kali angka agregat di tingkat nasional maupun provinsi tidak mampu menangkap nuansa sosiopolitik yang spesifik dan unik di tingkat kabupaten atau kota.

Secara teoritis, pemahaman mengenai demokrasi telah berkembang dari sekadar definisi minimalis-prosedural menuju pemahaman yang lebih substantif dan berkualitas. Joseph Schumpeter (1942) dalam pemikiran klasiknya menekankan bahwa demokrasi adalah sebuah metode institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif guna mendapatkan suara rakyat. Namun, pandangan ini sering dikritik karena terlalu menyederhanakan demokrasi hanya sebatas mekanisme pemilu. Sejalan dengan perkembangan zaman, Robert Dahl (1971) memperkenalkan konsep poliarki yang mensyaratkan adanya partisipasi aktif dan kompetisi yang sehat, yang

didukung oleh jaminan kebebasan sipil yang kuat. Dalam konteks Indonesia, tantangan demokrasi sering kali terjebak dalam apa yang oleh para pakar disebut sebagai "demokrasi yang cacat" atau *flawed democracy*, di mana prosedur pemilihan umum berjalan dengan baik, namun aspek penegakan hukum, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan akses terhadap keadilan masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Oleh karena itu, pengukuran IDI di Kota Blitar pada tahun 2025 mendatang menjadi sebuah upaya ilmiah untuk menguji apakah teori-teori konsolidasi demokrasi ini benar-benar terinternalisasi dalam kebijakan lokal atau sekadar menjadi jargon politik administratif semata.

Pentingnya melakukan riset IDI di Kota Blitar pada tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari momentum sejarah politik yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Tahun 2023 merupakan tahun kontestasi besar menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak, sementara tahun 2024 menjadi masa transisi awal di mana pemerintahan baru hasil pilihan rakyat mulai menjalankan mandatnya secara penuh. Dengan demikian, studi IDI yang dilakukan pada tahun 2025 berfungsi untuk mengevaluasi kinerja satu tahun penuh pemerintahan pasca-transisi. Tahun 2025 akan menjadi cermin yang jernih untuk melihat apakah demokrasi pasca-Pilkada 2024 mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan sipil atau justru melahirkan kecenderungan tekanan kebebasan publik. Tanpa adanya pengukuran yang spesifik di tingkat kota, kita tidak akan pernah tahu apakah skor IDI Kota Blitar yang sebelumnya mencapai 84,37 poin pada tahun 2023 dan 88,68 pada 2024 dapat dipertahankan atau justru mengalami kemunduran akibat kondisi sosio-politik yang berubah.

Urgensi riset tahun 2025 juga terletak pada kebutuhan untuk menjembatani celah dataset antara capaian ekonomi dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam tinjauan teoritis mengenai hubungan antara ekonomi dan demokrasi, terdapat perdebatan panjang mengenai apakah pertumbuhan

ekonomi mendahului demokrasi atau sebaliknya. Namun, di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa daerah dengan skor IDI yang lebih tinggi cenderung memiliki stabilitas sosial yang lebih baik yang pada akhirnya mendorong iklim investasi dan pembangunan manusia. Studi IDI 2025 akan membedah secara mendalam apakah kebijakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024 telah berhasil mengatasi ketimpangan akses ekonomi ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesetaraan warganya, sesuai dengan dimensi kedua dalam metodologi IDI terbaru.

Selain itu, tahun 2025 adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja lembaga pengawas dan penegak hukum pasca-hiruk-pikuk pemilu. Isu-isu mengenai politik uang, ancaman kerawanan di TPS, serta aksi massa di depan KPU yang sempat mewarnai wajah politik Kota Blitar pada 2023 memerlukan evaluasi jangka panjang. Apakah kesadaran politik masyarakat yang meningkat melalui pelaporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu akan menetap sebagai budaya pengawasan publik yang berkelanjutan pada tahun 2024, ataukah akan meredup seiring selesainya kontestasi?

Pengukuran IDI terbaru yang mencakup aspek kapasitas lembaga demokrasi akan menguji sejauh mana DPRD Kota Blitar dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu mampu menjaga netralitas dan efektivitasnya dalam mengawal aspirasi masyarakat setelah mereka tidak lagi berada di bawah tekanan kampanye. Hal ini penting karena sering kali kualitas demokrasi merosot justru pada periode pasca-pemilu akibat adanya pembagian kekuasaan yang cenderung mengabaikan kontrol publik.

Penyusunan IDI ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori demokrasi lokal di Indonesia. Sering kali, kajian akademik hanya berfokus pada skala nasional, sehingga dinamika kota kecil seperti Kota Blitar sering terabaikan. Padahal, demokrasi di tingkat kabupaten dan kota adalah fondasi utama dari bangunan demokrasi nasional. Jika pondasi di tingkat daerah rapuh, maka demokrasi di tingkat pusat hanyalah sebuah etalase

kosong. Melalui pengukuran IDI 2025, kita dapat melihat bagaimana interaksi antara identitas budaya lokal Blitar yang kuat dengan struktur politik modern menghasilkan sebuah sintesa demokrasi yang unik. Dengan menempatkan aspek kebebasan berkeyakinan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas sebagai salah satu variabel utama, riset ini akan memastikan bahwa misalnya toleransi di Kota Blitar bukan hanya sebatas tidak adanya konflik fisik, melainkan adanya jaminan hukum yang setara bagi setiap individu untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa rasa takut.

Penghitungan IDI 2025 ini menggunakan metode IDI yang terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator. Tiga aspek yang dimaksud terdiri atas aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Aspek kebebasan membahas mengenai sejauh mana sektor- sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan membahas mengenai sejauh mana kelompok minoritas atau sub-altern secara substansial memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi membahas mengenai sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial. Tiga aspek tersebut akan dijabarkan secara lebih spesifik ke dalam beberapa indikator supaya penghitungan indeks demokrasi menjadi lebih tepat sasaran.

Akhirnya, pelaksanaan studi Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar pada tahun 2025 bukan sekadar rutinitas administratif Bakesbangpol, melainkan sebuah komitmen intelektual untuk menjaga marwah demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin serta pengambilan keputusan dalam ranah

politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan instrumen yang dapat digunakan sebagai ukuran objektif.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan ilmiah yang sangat berharga bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) agar lebih sensitif terhadap isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan memahami bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dirawat dan diukur, Kota Blitar dapat memposisikan dirinya sebagai model bagi daerah lain di Indonesia dalam hal pelestarian nilai-nilai demokrasi yang inklusif. Pengukuran IDI pada akhirnya diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan besar; apakah setelah melalui badai politik 2023 dan masa pemilu 2024 demokrasi di Kota Blitar semakin mendalam dan berkualitas? Lalu, dengan lanskap politik yang berubah, berapa skor IDI Kota Blitar 2025?

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kondisi demokrasi di Kota Blitar dengan menggunakan indeks demokrasi Indonesia (IDI). Adapun Manfaat riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan demokrasi melalui data empiris dan perkembangannya. Selain itu, secara praktis diharapkan kegiatan ini mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kota Blitar dalam merumuskan kebijakan pada masa yang akan datang dengan mempedomani hasil laporan ini sehingga dapat mencegah aktivitas yang kontra terhadap nilai-nilai demokrasi.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar 2025 melibatkan sejumlah instansi pemerintahan, media, serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan data yang

meliputi telaah dokumen (peraturan, dokumen resmi dan pemberitaan sepanjang 2024) dan focus group discussion (FGD) terkait isu yang berhubungan langsung dengan Indikator IDI. Adapun indikator IDI yang digunakan terdiri dari 22 indikator yang mengacu pada Naskah Akademik IDI 2022 indikator baru.

Ruang lingkup dari kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup tahun penggunaan data pada penyusunan Indeks Demokrasi Kota Blitar adalah tahun 2025; dan
2. Ruang lingkup materi memuat pengukuran nilai Indeks Demokrasi Kota Blitar secara global, aspek, dan indikator.

1.4 Sasaran Output

Sasaran dalam kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Kota Blitar Tahun 2025 adalah data kondisi demokrasi di Kota Blitar berdasarkan 22 Indikator yang digunakan. Adapun Output ini adalah laporan IDI 2025 yang sekaligus menjadi data yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja IDI Pemerintah Kota Blitar.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan IDI Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Teoritis tentang Demokrasi

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (dalam Heywood, 2013: 153), dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya demokrasi kemudian memasukkan prinsip perwakilan. Prinsip perwakilan sendiri juga mengalami perkembangan. Misalnya di Eropa pada abad ke 18 prinsip perwakilan itu hanya diwakili oleh elit tertentu yakni kelompok bangsawan dan tuan tanah. Tetapi menjelang abad ke 20 prinsip perwakilan semakin meluas, tidak hanya kelompok bangsawan dan tuan tanah tetapi juga meluas ke semua rakyat biasa. Prinsip perwakilan dalam praktiknya kemudian menuai kritik. Tidak cukup hanya mengedepankan prinsip perwakilan yang adil bagi semua orang, tetapi juga perlunya pengakuan terhadap hak-hak sipil. Sehingga kemudian sistem demokrasi juga harus didukung dengan adanya *civil liberties* (Ramses dan Bakry (ed). 2009: 17-18).

Robert Dahl juga menegaskan bahwa demokrasi dapat memberikan jaminan kebebasan yang tidak dapat ditandingi oleh sistem politik apapun. Demokrasi dapat mendorong kebebasan melalui tiga cara. *Pertama*, Pemilu yang bebas dan adil dan diikuti dengan kebebasan sipil yang lebih luas. *Kedua*, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri (self determination). *Ketiga*, demokrasi mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan tanggung jawab masyarakat yang dibarengi dengan penyediaan sarana masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka (Larry Diamond. 2003: 3-4).

Lebih detail, Robert Dahl (1992, h 1) menjelaskan beberapa indikator demokrasi, antara lain:

“1. Terdapat kontrol atas kebijaksanaan pemerintah. 2. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka dan bebas dimana di dalamnya kekerasan dapat

dibatasi. 3. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. 4. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi kandidat dalam pemilihan umum. 5. Warga negara mempunyai hak-hak seperti kebebasan berekspresi, terutama ekspresi politiknya, termasuk di dalamnya mengkritik pemerintah. 6. Mereka juga mempunyai akses untuk mendapatkan sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain. 7. Akhirnya mereka mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga yang otonom, termasuk lembaga politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah dengan ikut dalam pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.”

Pendapat yang serupa, Afan Gaffar (1999, h 7-10) menjelaskan secara normatif demokrasi merupakan sesuatu yang secara *idil* hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, yang dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kontitusi. Sedangkan secara empirik demokrasi harus diwujudkan dalam kehidupan politik praktis (demokrasi sehari-hari). Selain itu, Afan Gaffar juga memberikan penjelasan mengenai indikator apa saja yang harus dipenuhi dalam sistem demokrasi. Indikator tersebut antara lain: *pertama*, akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat maka harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. *Kedua*, rotasi kekuasaan. Adanya pergantian pemerintahan secara teratur dengan cara yang damai antara satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya. *Ketiga*, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi memperebutkan jabatan politik. *Keempat*, pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dari masing-masing negara. Serta setiap warga yang sudah memenuhi kriteria mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan secara bebas menggunakan hak tersebut sesuai dengan hati nuraninya. *Kelima*, menikmati hak-hak dasar manusia. Setiap warga negara mempunyai beberapa hak dasar terutama hak-hak dasar yang sudah disepakati oleh konvensi PBB. Setiap individu mempunyai kesempatan

untuk menikmati hak-hak dasar tersebut, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, dan kebebasan pers.

Selain Robert Dahl, tokoh lain yang mempunyai kontribusi dalam perkembangan demokrasi adalah Samuel Huntington. Huntington memaknai demokrasi sebagai kompetisi para kandidat untuk merebutkan jabatan politik di lembaga legislatif ataupun eksekutif. Secara sempitnya demokrasi dimaknai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Akan tetapi adanya sistem pemilu tidak otomatis menjadikan sistem politik demokrasi dalam suatu negara. Sistem perwakilan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum semakin kurang efektif dalam mewujudkan tujuan utama sistem politik demokrasi. Hal itu dikarenakan pejabat terpilih dalam membuat keputusan tidak melalui diskusi publik dan kebijakan yang dihasilkan hanya dinikmati mereka yang dapat memobilisasi suara. Selain itu, semakin menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Rousseau menjelaskan sebagai partisipasi periodik warga negara. Artinya masyarakat hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum, tapi setelah pejabat terpilih masyarakat kembali terbelenggu (Ramses M dan La Bakry (ed), 2009, h 25-26). Huntington (dalam (Ramses M dan La Bakry (ed), 2009, h 80) menjelaskan beberapa kriteria penting dalam demokrasi:

1. Adanya kerangka konstitusional
2. Adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan
3. Jaminan atas hak asasi manusia
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Adanya sistem pemilihan
6. Adanya pluralism politik
7. Tidak ada larangan terhadap informasi-informasi alternatif.

8. Hak atas peradilan yang tidak memihak serta diizikannya *public contestation*.

Demokrasi bagai dua wajah mata uang, di satu sisi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik tapi disisi lain demokrasi belum tentu menjadi bentuk pemerintahan terbaik. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena 3 hal (Heywood, 2013: 160-163), *Pertama*, demokrasi sebagai bentuk tertinggi dari politik. Ketika demokrasi bersandar pada debat terbuka, persuasi dan kompromi, serta warga negara dengan kepentingan yang berbeda mendapatkan hak suara dalam politik maka dapat mendorong sebuah kehidupan bersama yang stabil dan damai. *Kedua*, demokrasi sebagai sebuah nilai universal artinya demokrasi sebagai hak asasi manusia. Hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara baik itu hak dalam partisipasi politik maupun akses terhadap kekuasaan. *Ketiga*, demokrasi dapat menjauhkan tirani. Bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Oleh karena itu demokrasi memberikan batasan kekuasaan serta perlunya mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan demokrasi dianggap sebagai sistem yang tidak baik dikarenakan beberapa hal, antara lain: *pertama*, disharmoni dari demokrasi. Demokrasi seringkali menyebabkan pertempuran electoral antar pihak yang berlawanan. *Kedua*, demokrasi sebagai westernisasi. Demokrasi didasarkan pada budaya barat seperti individualisme, melalui prinsip kesetaraan “satu orang satu suara”. *Ketiga*, pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang populer. Masalah demokrasi adalah kebijaksanaan dan pengalaman cenderung diabaikan karena pandangan dari kalangan berpendidikan yang minoritas disingkirkan oleh pandangan dari kalangan kurang berpendidikan yang mayoritas (Heywood, 2013: 160-162).

2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur pembangunan demokrasi di Indonesia. Pemerintah serius mendorong pembangunan sektor ini yang antara lain dapat dilihat dengan telah memasukkan IDI sebagai salah satu target pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2023, bahkan telah masuk ke dalam RPJPN 2024-2045 dan diselaraskan hingga RPJPD bagi seluruh Pemerintah Daerah. IDI disusun dalam kerangka kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Pemerintah Provinsi, serta akademisi dan kalangan masyarakat yang dilibatkan dalam tahapan pengukuran IDI. IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009 dan yang terakhir IDI 2023 dengan menggunakan indikator baru yang direvisi pada 2022.

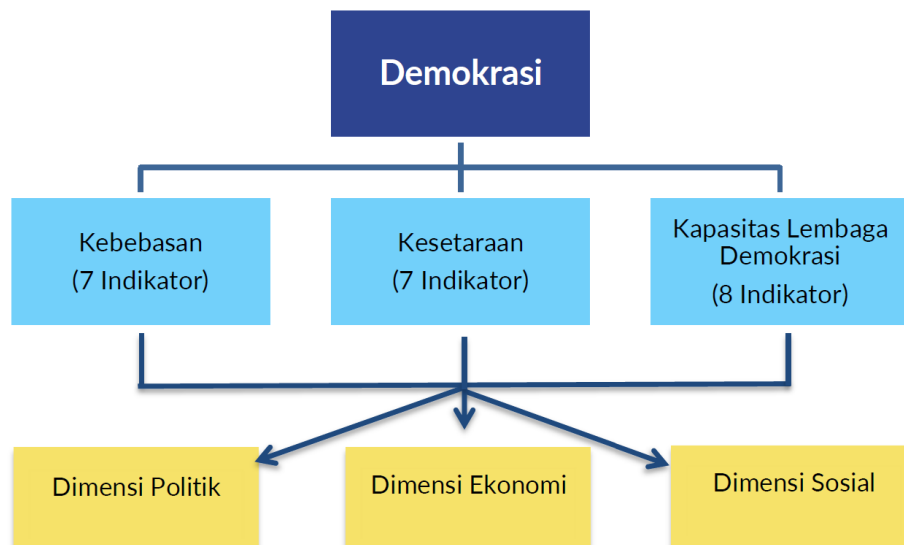
Penghitungan IDI sendiri tidak lepas dari penyempurnaan indikatornya, terutama melalui Naskah Akademis yang dikeluarkan pada 2022. Selama 13 tahun penghitungan (2009-2022), dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Oleh karena itu diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.

Melalui proses kajian literatur yang mencakup studi atas teori dan konsep demokrasi, studi perbandingan antar indeks demokrasi, dan studi terhadap konstitusi (UUD 1945) tim kajian merumuskan dua hal penting. Pertama, pembaharuan teori dan konsep demokrasi dalam pengukuran IDI. Kedua, pembaharuan prinsip-prinsip kunci demokrasi dalam pengukuran indeks. Pembaharuan teori dan konsep soal demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI metode baru merujuk pada konsepsi demokrasi menurut Hee Yeon Cho (2012). Ada sejumlah alasan yang mendasari pembaharuan konsep demokrasi pada penyusunan IDI dengan menggunakan metode baru, yaitu:

Cho Memaknai demokrasi dalam konteks pengalaman demokrasi negara-negara Asia pasca rezim otoriter, seperti yang dihadapi Indonesia. 2. Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia sudah berhasil dilalui dengan pembentukan institusi-institusi demokrasi, namun Indonesia seperti halnya negara-negara Asia lainnya mengalami tantangan konsolidasi demokrasi karena munculnya kekuatan oligarki, masyarakat sipil yang terfragmentasi, ketimpangan ekonomi, serta pemilu dan pelembagaan demokrasi yang masih dalam tatanan prosedural. 3. Terdapat monopoli sumber daya kekuasaan yang tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah ekonomi dan sosial. Sehingga konsep demonopolisasi Cho yang mencakup tiga ranah (politik, ekonomi, dan sosial) sangat relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Menurut Cho, inti dari demokrasi adalah penyebaran kekuasaan. Demokrasi dimaknai sebagai proses demonopolisasi. Demokrasi tercapai ketika kekuasaan sudah tersebar, tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang. Demokrasi merupakan formasi sosial yang tercipta dari pertarungan dari beragam kelompok sosial. Kondisi demokratis tercapai jika terjadi demonopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi dan sosial.

IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Indikator demokrasi yang digagas sejak 2022 ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut.



Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat.
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.
6. Pemenuhan hak-hak pekerja.
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya

dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kesetaraan gender
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
3. Anti monopoli sumber daya ekonomi
4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
5. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah
6. Akses masyarakat terhadap informasi publik
7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kinerja Lembaga Legislatif
2. Kinerja Lembaga Yudikatif
3. Netralitas Penyelenggara Pemilu
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah
7. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
8. Pendidikan politik pada kader partai politik

Adapun penjelasan per masing-masing indikator tersebut akan diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB III METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada riset tentang Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar 2025 ini menggunakan metode campuran (Mixed method). Metode ini menggabungkan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk meningkatkan pemahaman terhadap pertanyaan penelitian yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian yang dihadapi. Keutamaan dari metode campuran ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap kompleksitas pengalaman dan fenomena manusia, yang sering kali tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui lensa metodologis tunggal (Doyle et al., 2009; Zhang C Creswell, 2013).

Pendekatan ganda ini tidak hanya memperkaya data tetapi juga meningkatkan validitas temuan penelitian dengan melakukan triangulasi hasil dari berbagai sumber (O'Cathain et al., 2008). Selain itu, penggunaan metode campuran dapat memfasilitasi interpretasi data yang lebih bernuansa. Dengan mengintegrasikan wawasan kualitatif dengan hasil kuantitatif, peneliti dapat menemukan pola dan tema yang mungkin tetap tersembunyi jika hanya menggunakan satu metode saja. Integrasi ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang konteks penelitian dan memungkinkan analisis yang lebih kuat terhadap temuan-temuan yang ada.

Data dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di portal berita online mengingat aksesibilitas dan cakupan peristiwa di Kota Blitar yang lengkap. Selain itu, data berupa dokumen resmi (LKJiP, rekap kegiatan instansi, dll) serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah juga akan digunakan sebagai data utama. FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu

konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam riset ini berupa berita, dokumen resmi dari OPD di Pemerintah Kota Blitar serta Focus Group Discussion (FGD) yang didasarkan pada data sepanjang 2024. Data-data ini disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan indikator IDI. Adapun beberapa data yang dimaksudkan adalah:

a. Dokumen

Dokumen yang dimaksudkan dalam riset ini berupa pemberitaan dari media online (<https://blitarkawentar.jawapos.com/>), regulasi dan laporan resmi dari Pemerintah Kota Blitar (Perda, LKjIP, APBD, data BPS, dan data lainnya). Dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan indikator komposit penghitungan IDI. Data sektoral yang disampaikan saat FGD

b. Focus Group Discussion

Setelah mendapatkan data dari hasil coding dokumen, FGD menjadi bagian penting untuk menggali data lebih dalam. Kegiatan FGD ini sekaligus digunakan sebagai bagian dari goodness criteria yang dapat mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari proses sebelumnya dan dengan demikian dapat meminimalisir bias.

Adapun kegiatan FGD ini melibatkan beberapa aktor utama pengampu data sektoral sebagai bagian indikator komposit untuk dapat memberikan pendapatnya. Beberapa aktor yang dimaksudkan terdiri dari perwakilan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, pekerja media yang tergabung dalam asosiasi profesi, LSM, dan akademisi.

3.2 Indikator dan Variabel IDI

Konsep	Indikator	Variabel
Kebebasan	1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	Jumlah kasus ancaman dan atau kekerasan oleh aparat negara dalam lingkup Kota Blitar (meliputi: TNI, Polisi, Satpol PP dan unsur pemerintah lainnya) yang membatasi dan menghambat kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikalikan 100.000
	2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	Jumlah kasus penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikali 100.000
	3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Jumlah kasus berupa ancaman dan tindak kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan yang dilakukan oleh kelompok, organisasi, komunitas dari masyarakat maupun aparat negara dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikali 100.000
	4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	• Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi.

		Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Selanjutnya total dari aturan tertulis yang menghambat kebebasan tersebut dibagi dengan jumlah OPD
	5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	Jumlah kasus hambatan kebebasan memilih dan dipilih yang terjadi pada pemilu. Kasus-kasus tersebut dibagi dengan jumlah pemilih lalu dikali dengan 100.000. persentase TPS yang berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia dibagi dengan total laporan masuk ke Siwaslu. Data kasus pelanggaran pemilu dan ketiadaan kekurangan fasilitas TPS untuk disabilitas dihitung skornya masing-masing kemudian dirata-rata.
	6. Pemenuhan hak-hak pekerja	Persentase pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian pada Sakernas
	7. Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya.	Angka Indeks Kemerdekaan Pers Kota atau jumlah kasus menghambat kerja-kerja jurnalistik di Kota Blitar.
Kesetaraan	8. Kesetaraan Gender	Skor Indeks Pemberdayaan Gender 2023

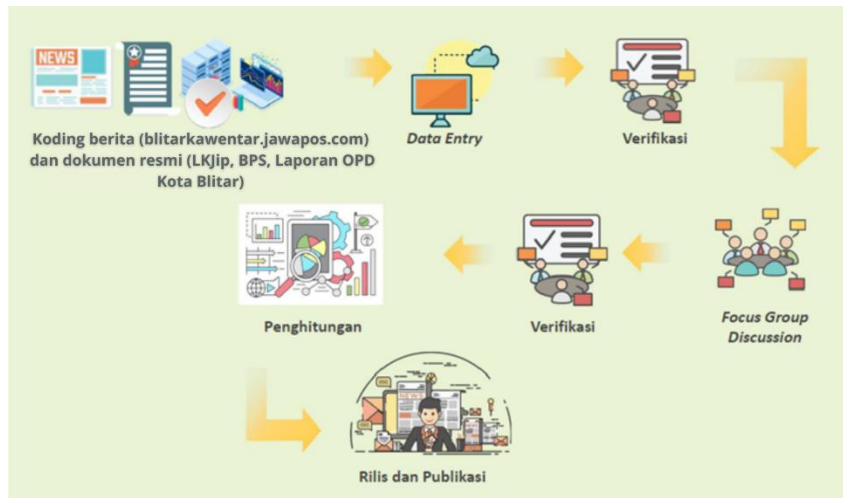
	9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Hasil hitung antara jumlah hearing, audiensi, dan berbagai forum di DPRD Kota Blitar dibagi dengan jumlah kursi DPRD Kota Blitar.
	10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Skor Indeks Persaingan Usaha
	11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	persentase warga dengan kategori miskin yang tidak menerima bantuan pemerintah sama sekali. Dihitung dari jumlah warga miskin penerima bantuan dibagi jumlah total warga miskin di Kota Blitar
	12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Persentase tingkat kesempatan kerja yang dihitung dari jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja.
	13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Angka Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Blitar
	14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Persentase layanan dasar pada aspek air minum, sanitasi layak, fasilitas kesehatan, dan angka partisipasi murni (APM) SD, SMP, SMA.
Kapasitas Lembaga Demokrasi	15. Kinerja Lembaga Legislatif	Persentase Perda disahkan terhadap target Propemperda
	16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus di lingkungan pengadilan tinggi.
	17. Netralitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah putusan Bawaslu terkait netralitas penyelenggara pemilu dalam lingkup Kota Blitar

	18. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Jumlah kebijakan/keputusan pejabat Pemda yang dinyatakan bersalah oleh PTUN
	19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Nilai atau skor IKLH Kota Blitar
	20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Jumlah informasi APBD yang ditampilkan dalam <i>website</i> pemerintah daerah
	21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik
	22. Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD terhadap jumlah kursi di DPRD

Sumber: Naskah Akademik IDI, 2022

3.3 Teknik Analisis Data

Penghitungan IDI merupakan hasil agregat dari ragam indikator yang dilihat dari berbagai data, sebagaimana merujuk pada tiga aspek atau konsep utama dalam IDI (Kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi). Adapun proses penggalan hingga analisa data dapat secara sederhana dilihat pada gambar berikut ini:



Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisa pada tiap-tiap bagian yang nantinya akan ditarik skor IDI secara general. Beberapa langkah analisa dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator. Skor indikator dihitung dengan rumus:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})} \times 100$$

X_{ijk} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.

X_{ideal} : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}

X_{terburuk} : tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}

Persamaan tersebut menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$;

Untuk mengetahui nilai ideal dan terburuk pada masing-masing indikator, digunakan penilaian dari ahli yang terlibat dalam penghitungan *Analysis Hierarchy Process (AHP)* yang telah dilakukan oleh BPS secara nasional.

2. Menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{ijk})$$

$I(A_{ij})$: Indeks Kota ke-i aspek ke-j

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k

$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI provinsi ke-i, aspek ke-j, indikator ke-k

3. Langkah ketiga adalah menghitung IDI Kota Blitar yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij})$$

IDI_i : Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar ke-i

P_j : Nilai penimbang dari aspek ke-j

$I(A_{ij})$: Indeks Kota Blitar ke-i aspek ke-j

j : 1 = kebebasan, 2 = kesetaraan, 3 = kapasitas lembaga demokrasi

Adapun nilai ideal dan terburuk dari setiap indikator adalah sebagai berikut:

Aspek Bobot berdasarkan AHP

1	Aspek Kebebasan	0,310		
2	Aspek Kesetaraan	0,376		
3	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	0,314		
Indikator Aspek Kebebasan		Skor	Ideal	terburuk
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	0,161	0	0,5
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0,125	0	0,2
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	0,175	0	0,3
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0,156	0	100
5	Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	0,126	0	0,2
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	0,115	30	0

7	Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya	0,142	100	0
Indikator Aspek Kesenjangan		Skor		
8	Kesenjangan Gender	0,108	75,83	0
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	0,122	0,5	0
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	0,173	7	1
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	0,188	100	0
12	Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah	0,129	100	0
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	0,140	100	0
14	Kesenjangan dalam pelayanan dasar	0,138	100	0
Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		Skor		
15	Kinerja Lembaga Legislatif	0,104	100	0
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	0,148	100	0
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	0,134	0	2
18	Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0,095	0	2
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	0,123	100	0
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	0,132	100	0
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	0,160	5	0
22	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	0,103	5	0

3.4 Goodness Kriteria

Pengukuran kualitas penelitian menurut Neuman (2014) menentukan kesahihan atau validitas riset yang disebut *goodness criteria*. Dalam studi kualitatif, keandalan dari penggunaan berbagai sumber data dan metode

pengukuran pada peneliti harus diperhatikan karena terdapat salah satu kesulitan yang membuat sumber data terkadang tidak stabil dari waktu ke waktu (Neuman, 2014, hlm. 218). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya interaksi yang berubah atau berkembang antara peneliti dan subjek penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang terkunci dalam gagasan replikasi, ekuivalen, dan subpopulasi yang merujuk pada pengertian data atau hasil penelitiannya yang dapat diterapkan pada konteks atau kelompok lain.

Penilaian kesahihan riset kualitatif tersebut biasanya terjadi sewaktu proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi data. Jenis-jenis penilaian ini diantaranya:

a. Trustworthiness

Pada kriteria ini, dipahami sebagai upaya untuk menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami. Terdapat dua hal yang bisa diperhatikan untuk melihat *trustworthiness* ini, yaitu terkait autentisitas dan analisis triangulasi.

- 1) Autentisitas mengupayakan perluasan konstruksi personal yang diungkapkan peneliti, tidak didasarkan pada asumsi pribadi, dan mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk mengecek kebenaran dari data yang diteliti. Autentisitas juga berkaitan dengan kejujuran sehingga peneliti harus benar-benar menyajikan hasil analisis yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam data serta sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.
- 2) Analisis triangulasi adalah upaya menganalisis subjek data dengan meriset kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Dalam penelitian ini, analisis triangulasi didasarkan pada triangulasi konsep IDI dan dikorespondensikan dengan data empiris yang ada di lapangan.

b. Intersubjectivity Agreement

Semua pandangan, pendapat, atau data dari suatu subjek didialogkan dengan pendapat, pandangan, atau data dari subjek lainnya, yang bertujuan untuk menghasilkan titik temu antar data (*intersubjectivity agreement*) sekaligus tidak membuat adanya data yang dibuang. Dalam penelitian ini,

peneliti turut mempertimbangkan keterangan dari narasumber melalui wawancara dan FGD untuk menilai data yang didapatkan dari dokumen.

d. Transferbility

Pada aspek ini, hasil pengukuran IDI memungkinkan dapat diterapkan pada wilayah lain. Penggunaan metode IDI dari BPS serta penggunaan metode ini di sejumlah daerah menunjukkan secara metodologis dapat digunakan secara berulang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ulasan Peristiwa Penting Di Kota Blitar

Sepanjang 2025, peristiwa yang terkait dengan demokrasi Kota Blitar diberitakan dengan cukup normatif. Sejumlah peristiwa yang berkaitan langsung dengan indikator demokrasi akan dicatat dan disalin pada lembar coding untuk memberikan gambaran rigid dan tidak terlewat tentang demokrasi. Hal ini dilakukan melalui penelusuran pada media online lokal, yaitu <https://blitarkawentar.jawapos.com/> mulai Januari hingga Desember 2025.

Triwulan I

Pada Triwulan pertama, pemberitaan didominasi oleh isu kesetaraan gender dan kebebasan ekonomi (pekerja), sementara dimensi lembaga demokrasi mulai muncul secara terbatas. Dalam indikator kebebasan, narasi yang paling menonjol berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja, khususnya pembayaran THR dan kenaikan UMK, yang menunjukkan bahwa kebebasan lebih dimaknai sebagai perlindungan hak ekonomi pekerja. Selain itu, terdapat pemberitaan mengenai aksi demo pekerja tambang yang menolak penutupan tambang, yang merepresentasikan adanya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi, meskipun masih bersifat sporadis dan belum meluas ke isu kebebasan sipil lainnya.

Dalam indikator kesetaraan, pemberitaan Triwulan I paling banyak mengangkat kiprah, prestasi, dan kerentanan perempuan di ruang sosial, budaya, dan ekonomi. Kesetaraan gender menjadi isu yang paling konsisten muncul, disertai dengan beberapa pemberitaan mengenai partisipasi masyarakat melalui DPRD serta akses perlindungan sosial dan layanan dasar. Namun, isu-isu tersebut cenderung disajikan secara informatif dan simbolik, belum mengarah pada pembahasan ketimpangan struktural atau evaluasi kebijakan secara kritis

Sementara itu, pada indikator lembaga demokrasi, pemberitaan masih terbatas dan berfokus pada peran DPRD sebagai lembaga pengawas, baik dalam menjaga keseimbangan kebijakan maupun merespons persoalan birokrasi. Transparansi anggaran dan kinerja birokrasi mulai muncul, tetapi lebih banyak ditampilkan dalam konteks masalah atau keluhan, bukan

sebagai praktik keterbukaan yang sistematis. Dimensi lain seperti lembaga yudikatif, pendidikan politik, dan netralitas pemilu belum terpantau sama sekali dalam pemberitaan triwulan ini

Secara keseluruhan, Triwulan I merepresentasikan fase awal demokrasi yang bersifat simbolik dan representasional, di mana isu perempuan dan kebebasan ekonomi menjadi fokus utama, sementara lembaga demokrasi mulai hadir melalui fungsi administratif dan pengawasan DPRD. Demokrasi belum tampil sebagai proses substantif yang kritis, melainkan masih sebagai narasi normatif dan informatif di ruang publik.

Triwulan II

Pada Triwulan kedua, terjadi eskalasi isu kebebasan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemberitaan banyak menyoroti persoalan pailit perusahaan, pesangon yang belum cair, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, bantuan subsidi upah, serta peran dinas tenaga kerja dalam memediasi konflik dan pemulangan pekerja. Kebebasan dalam konteks ini semakin jelas dimaknai sebagai kebebasan ekonomi dan perlindungan hak pekerja, dengan tekanan publik yang lebih kuat terhadap pemerintah daerah untuk bertindak. Di sisi lain, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap muncul secara terbatas, misalnya melalui advokasi legislator perempuan, namun tidak menjadi arus utama pemberitaan.

Dalam indikator kesetaraan, pola pemberitaan Triwulan II masih menunjukkan dominasi isu kesetaraan gender, terutama terkait prestasi, advokasi, dan peran perempuan di ruang publik. Selain itu, mulai muncul secara lebih jelas isu kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja lintas daerah, serta pembaruan data bantuan sosial. Meski demikian, isu perlindungan sosial dan pelayanan dasar masih disajikan secara informatif dan administratif, tanpa penggalian mendalam terhadap ketimpangan atau efektivitas kebijakan. Dengan demikian, kesetaraan pada triwulan ini tetap bersifat representasional, meskipun cakupan temanya mulai sedikit meluas dibandingkan Triwulan pertama.

Sementara itu, pada indikator lembaga demokrasi, Triwulan II memperlihatkan peran DPRD yang semakin menonjol sebagai mediator dan pengawas kebijakan, terutama dalam merespons konflik ketenagakerjaan dan

persoalan anggaran. Pemberitaan mengenai transparansi anggaran dan kinerja birokrasi muncul lebih sering dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih didominasi oleh narasi problem-oriented, seperti kendala koordinasi dan belum optimalnya layanan publik. Dimensi demokrasi lainnya seperti lembaga yudikatif, netralitas pemilu, dan pendidikan politik masih belum terpantau dalam pemberitaan.

Secara keseluruhan, Triwulan II dapat dipahami sebagai fase eskalasi konflik dan mediasi, di mana kebebasan pekerja menjadi isu paling menonjol, kesetaraan tetap berpusat pada narasi perempuan, dan lembaga demokrasi tampil sebagai aktor penengah antara masyarakat dan pemerintah. Demokrasi pada periode ini bergerak dari simbolik menuju fungsional, namun masih terbatas pada peran administratif dan penyelesaian masalah jangka pendek, belum pada penguatan proses demokrasi yang substantif.

Triwulan III

Pada Triwulan III, intensitas pemberitaan terkait indikator kebebasan mengalami penurunan signifikan dibandingkan dua triwulan sebelumnya. Tidak ditemukan pemberitaan yang secara langsung membahas isu kebebasan dalam konteks hak pekerja maupun kebebasan berpendapat secara eksplisit. Fokus pemberitaan bergeser, sehingga kebebasan tidak lagi menjadi isu utama dalam ruang publik pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa isu kebebasan, khususnya yang bersifat ekonomi-pekerja, bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh momentum konflik atau kebijakan tertentu.

Dalam indikator kesetaraan, pemberitaan Triwulan III kembali didominasi oleh narasi kiprah dan prestasi perempuan, baik di bidang olahraga, pendidikan, maupun kepemimpinan organisasi. Selain itu, terdapat sejumlah kecil pemberitaan mengenai partisipasi publik melalui lembaga perwakilan serta isu perlindungan sosial dan mobilitas kerja lintas daerah. Namun, seperti pada triwulan sebelumnya, isu-isu tersebut disajikan secara informatif dan deskriptif, tanpa pendalaman terhadap ketimpangan struktural atau evaluasi kebijakan yang lebih kritis. Kesetaraan pada fase ini tampil sebagai representasi simbolik keberhasilan individu, bukan sebagai isu keadilan sosial yang problematis.

Sementara itu, pada indikator lembaga demokrasi, kehadiran institusi demokratis dalam pemberitaan Triwulan III masih terbatas dan stagnan. Peran DPRD tetap menjadi yang paling menonjol, terutama dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, disertai kemunculan sangat terbatas dari lembaga yudikatif yang lebih bersifat simbolik daripada substantif. Isu transparansi anggaran muncul dalam bentuk penyampaian informasi fiskal, namun belum mencerminkan praktik keterbukaan proses secara menyeluruh. Kinerja birokrasi juga hanya disorot dalam konteks hambatan administratif layanan publik.

Secara keseluruhan, Triwulan III merepresentasikan fase stagnasi-informatif, di mana pemberitaan cenderung aman, normatif, dan minim konflik. Fokus bergeser dari isu kebebasan dan tekanan publik menuju narasi prestasi dan aktivitas kelembagaan yang rutin. Demokrasi pada periode ini tidak mengalami penguatan substantif, melainkan berjalan dalam pola administratif dengan ruang kritik dan advokasi yang relatif terbatas.

Triwulan IV

Pada Triwulan IV, pemberitaan menunjukkan penguatan yang cukup signifikan pada indikator lembaga demokrasi, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Peran DPRD tampil paling dominan sebagai lembaga pengawas dan evaluator kebijakan, khususnya dalam konteks pembahasan APBD, pelaksanaan program pemerintah, serta evaluasi kinerja akhir tahun. Selain itu, isu transparansi anggaran mulai muncul lebih kuat sebagai komitmen keterbukaan, tidak hanya sebatas informasi fiskal, tetapi juga sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Kinerja birokrasi juga digambarkan lebih responsif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis dan administratif. Berbeda dari triwulan sebelumnya, lembaga yudikatif mulai muncul dengan peran yang lebih jelas dalam penegakan hukum dan pelayanan keadilan, meskipun tetap terbatas.

Dalam indikator kesetaraan, Triwulan IV memperlihatkan pelebaran isu yang cukup nyata. Kesetaraan gender tetap mendominasi pemberitaan, namun narasinya tidak hanya berkutat pada prestasi dan representasi perempuan, melainkan juga meluas ke advokasi, penguatan UMKM, dan aspirasi sosial. Di samping itu, isu kesempatan kerja menjadi jauh lebih menonjol, mencakup penetapan UMK, serapan tenaga kerja, kerja sama

internasional, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, hingga kebijakan PPPK paruh waktu. Perlindungan sosial dan pelayanan dasar juga muncul lebih sering, terutama terkait jaminan kesehatan nasional (JKN), basis data bantuan sosial, serta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Meski demikian, sebagian besar pemberitaan masih bersifat informatif dan administratif, belum sepenuhnya kritis terhadap efektivitas kebijakan.

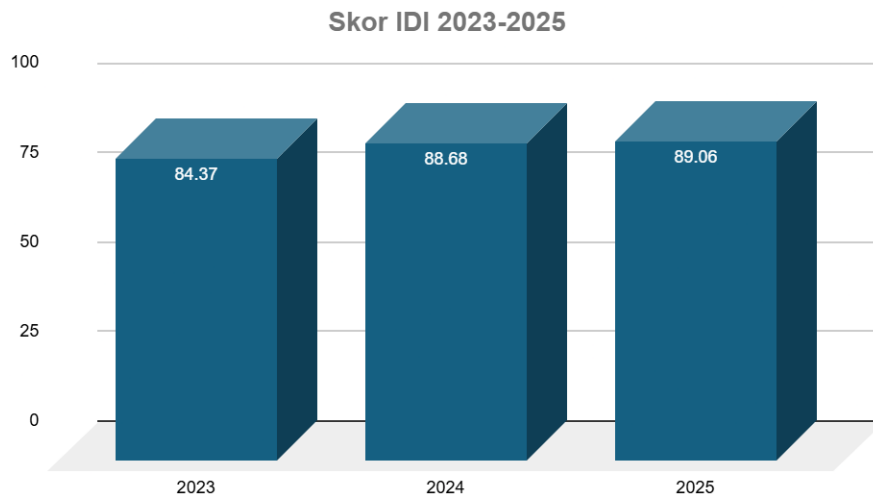
Sementara itu, indikator kebebasan pada Triwulan IV tetap lebih banyak dimaknai dalam kerangka hak ekonomi dan perlindungan pekerja, seperti kenaikan UMK dan fasilitasi jaminan bagi pekerja rentan. Selain itu, terdapat satu pemberitaan terkait hak jawab media, yang menunjukkan pengakuan terhadap mekanisme kebebasan pers dan etika jurnalistik, meskipun kemunculannya sangat terbatas. Kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil-politik secara luas masih belum menjadi fokus utama dalam pemberitaan periode ini.

Secara keseluruhan, Triwulan IV dapat dipahami sebagai fase refleksi dan akuntabilitas akhir tahun, di mana lembaga demokrasi tampil paling kuat dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Demokrasi direpresentasikan melalui evaluasi kebijakan, transparansi anggaran, dan upaya perbaikan layanan publik. Kesetaraan menunjukkan perluasan isu ke ranah ekonomi dan kebijakan sosial, sementara kebebasan tetap dipersempit pada aspek ekonomi-pekerja dan

mekanisme pers. Dengan demikian, Triwulan IV menandai penutup tahun yang relatif lebih akuntabel, meski belum sepenuhnya substantif dalam menggambarkan demokrasi yang kritis dan partisipatif.

4.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar 2025

Analisis terhadap capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar periode 2023-2025 memerlukan tinjauan mendalam yang tidak hanya terpaku pada angka, tetapi juga pada pergeseran paradigma metodologis. Sebagaimana tertuang dalam *Naskah Akademik Revisi IDI 2022*, struktur penilaian kini bertumpu pada tiga aspek utama yang lebih komprehensif: Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek ini merupakan pengejawantahan dari indikator komposit yang dirancang untuk menangkap realitas demokrasi di tingkat lokal secara lebih presisi dan substantif.



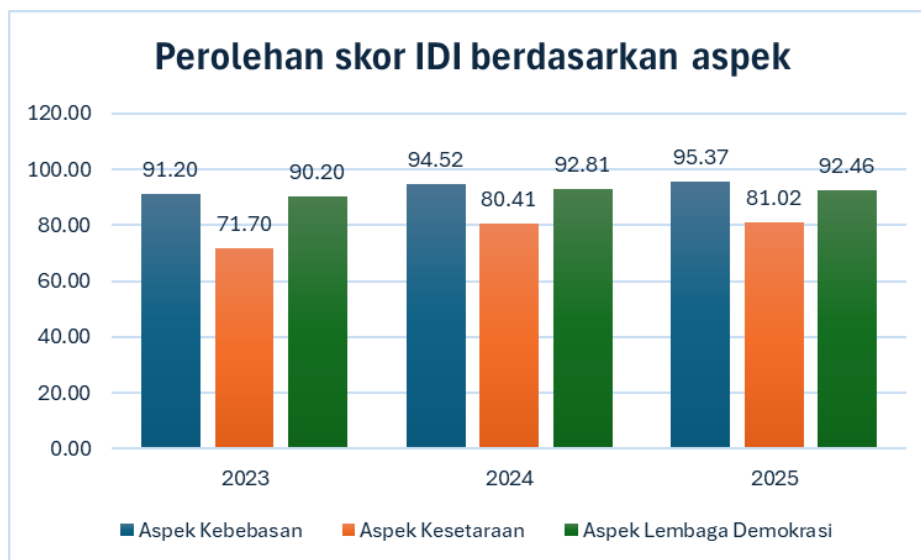
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar pada tahun 2025 menandai fase krusial dalam perjalanan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Secara umum, perolehan angka pada tahun 2025 menunjukkan performa yang konsisten naik meskipun dihadapkan pada dinamika politik transisional pasca-pemilu serentak Pemilu 2023 lalu. Jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2023 dan 2024, angka tahun 2025 merefleksikan kematangan institusional yang lebih stabil, di mana perubahan perolehan skor tidak lagi terjadi secara ekstrem, melainkan bergerak dalam rentang deviasi yang terkendali. Hal ini ditunjukkan dari perolehan skor IDI mencapai 89.06 pada 2025, sedikit naik dari tahun sebelumnya yaitu 88.68 pada 2024 dan 84.37 pada 2023.

Signifikansi angka tahun 2025 terletak pada keberhasilan Kota Blitar dalam mempertahankan integrasi antara aspek prosedural dan substansial. Pada tahun 2023, skor IDI banyak dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap instrumen metodologi baru yang lebih ketat, sementara tahun 2024 menjadi puncak akselerasi melalui inovasi keterbukaan informasi. Memasuki tahun 2025, angka yang diraih menunjukkan bahwa inovasi-inovasi tersebut telah terinstitusionalisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari skor kapasitas lembaga demokrasi yang tetap kokoh, mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan bukan lagi sekadar program momentum, melainkan telah menjadi standar operasional birokrasi di Kota Blitar.

Dalam perspektif kajian demokrasi, perolehan tahun 2025 ini sangat signifikan karena menunjukkan penguatan pada variabel kesetaraan dan

inklusivitas. Perbandingan proporsional menunjukkan bahwa jika pada 2023 fokus utama masih pada pemenuhan hak-hak sipil dasar, maka pada 2025, lokus demokrasi telah bergeser pada kualitas partisipasi kelompok marginal dan efektivitas regulasi lokal dalam melindungi minoritas. Kestabilan skor ini membuktikan bahwa Kota Blitar berhasil memitigasi risiko penurunan kualitas demokrasi yang sering kali melanda daerah-daerah lain pasca-kontestasi politik besar.

Namun, secara akademik, angka tahun 2025 juga memberikan catatan kritis mengenai stagnasi pada aspek kebebasan sipil. Meskipun secara akumulatif skor IDI tetap tinggi, tidak adanya lonjakan signifikan dibandingkan tahun 2024 mengisyaratkan adanya titik jenuh dalam pengembangan ruang publik. Hal ini menuntut adanya reorientasi kebijakan agar demokrasi tidak hanya berhenti pada capaian angka yang baik, tetapi juga pada pendalaman kualitas dialog kewargaan. Secara keseluruhan, potret IDI 2025 menegaskan posisi Kota Blitar sebagai entitas politik lokal yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, efisiensi birokrasi, dan pemenuhan hak-hak kewargaan dalam kerangka demokrasi yang berkelanjutan.



Pada tahun 2025, aspek *Kebebasan* di Kota Blitar menunjukkan resiliensi yang signifikan. Meskipun secara global terdapat kekhawatiran mengenai regresi demokrasi, angka yang dicapai Kota Blitar membuktikan bahwa ruang sipil lokal tetap terjaga. Signifikansi angka ini terlihat dari kemampuan daerah dalam meminimalisir hambatan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Hal ini sejalan dengan argumen Diamond (2020)

yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada perlindungan hak-hak sipil sebagai pilar utama kedaulatan warga. Perolehan tahun 2025 menunjukkan peningkatan proporsional dibandingkan tahun 2023, di mana pada masa awal transisi metodologi, terdapat ketidakpastian dalam pengukuran ekspresi digital. Pada 2025, stabilisasi angka menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah telah mencapai konsensus dalam menyeimbangkan ketertiban umum dengan kebebasan berekspresi.

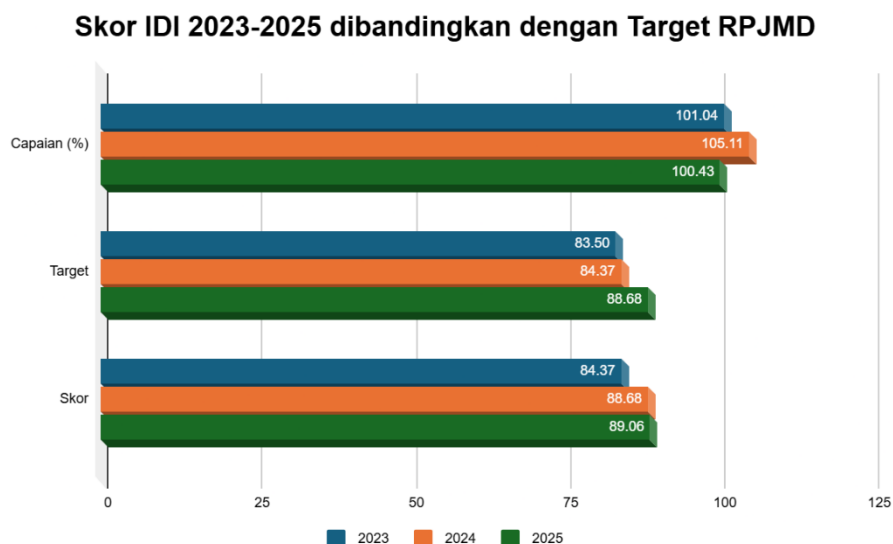
Sementara itu, pada aspek *Kesetaraan*, perolehan angka tahun 2025 menjadi titik balik inklusivitas politik di Kota Blitar. Perbandingan dengan tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan tren kenaikan yang linier. Signifikansi perolehan 2025 terletak pada integrasi kelompok marjinal ke dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks ini, partisipasi tidak lagi sekadar angka kehadiran, melainkan pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan. Merkl (2004) menekankan bahwa demokrasi yang matang memerlukan "demokrasi tertanam" (*embedded democracy*) di mana kesetaraan akses terhadap hak politik dijamin secara sistemik. Keberhasilan Kota Blitar meningkatkan skor pada aspek kesetaraan di tahun 2025 mencerminkan efektivitas kebijakan afirmasi yang sebelumnya mulai diinisiasi pada tahun 2024.

Aspek *Kapasitas Lembaga Demokrasi* pada tahun 2025 menampilkan performa yang paling stabil secara institusional. Signifikansi perolehan angka ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terletak pada efektivitas birokrasi dan peran pengawasan legislatif. Pada tahun 2023, kapasitas lembaga masih dalam tahap adaptasi terhadap keterbukaan data, namun pada 2025, akuntabilitas telah menjadi norma birokrasi. Perbandingan proporsional menunjukkan bahwa lonjakan kualitas yang terjadi pada 2024 mampu dipertahankan pada 2025 tanpa mengalami degradasi yang berarti. Hal ini membuktikan bahwa Kota Blitar telah berhasil melakukan institusionalisasi demokrasi, di mana fungsi kontrol terhadap kekuasaan berjalan secara otomatis melalui sistem yang transparan.

Kapasitas lembaga yang kuat di tahun 2025 juga mencerminkan peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi warga. Sebagaimana dijelaskan oleh Cordell, Rebecca & Dukalskis (2024) dalam penelitian mereka mengenai legitimasi institusional, kinerja lembaga

demokrasi yang transparan berkontribusi langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan. Skor yang terjaga pada level "Tinggi" di tahun 2025 menegaskan bahwa mekanisme *checks and balances* di tingkat lokal Kota Blitar berfungsi dengan baik, membedakannya dari tren nasional yang terkadang mengalami perubahan tajam akibat tekanan politik elektoral.

Perolehan skor IDI Kota Blitar tahun 2025 menggambarkan sebuah model demokrasi lokal yang sehat, di mana kebebasan sipil, kesetaraan hak, dan kapasitas institusional berada dalam titik keseimbangan yang optimal. Capaian ini memberikan legitimasi akademik bahwa penguatan demokrasi di tingkat akar rumput adalah kunci untuk menghadapi tantangan demokrasi global di masa depan.



Adapun perbandingan perolehan skor IDI dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), skor sepanjang 2023-2025 juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 2023, Kota Blitar mengawali periode ini dengan perolehan skor sebesar 84,37. Angka ini secara signifikan melampaui target RPJMD tahun tersebut yang dipatok pada angka 83,5, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 101,04%. Keberhasilan melampaui target di tahun pertama ini mengindikasikan bahwa fondasi demokrasi di Kota Blitar, baik dari aspek kebebasan maupun institusional, sudah berada pada jalur yang tepat sejak awal periode riset.

Memasuki tahun 2024, tren kenaikan skor terus berlanjut secara impresif dengan perolehan angka sebesar 88,68. Kenaikan ini terjadi di tengah target RPJMD yang juga meningkat menjadi 84,37. Dengan perolehan tersebut, efektivitas kinerja demokrasi Kota Blitar pada tahun 2024 mencatatkan persentase capaian sebesar 105,11%. Lonjakan ini menunjukkan adanya akselerasi yang kuat dalam pemenuhan indikator-indikator komposit IDI, yang melampaui ekspektasi perencanaan pembangunan daerah. Kesenjangan positif antara realitas skor dengan target administratif ini mencerminkan bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak sipil di Kota Blitar berjalan lebih progresif dibandingkan proyeksi formal yang direncanakan.

Pada tahun 2025, performa demokrasi Kota Blitar mencapai titik puncaknya dengan skor perolehan sebesar 89,06. Meskipun target RPJMD pada tahun tersebut dinaikkan menjadi 88,68 untuk merefleksikan standar kualitas yang lebih tinggi, realitas di lapangan tetap mampu melampaui batasan tersebut dengan persentase capaian sebesar 100,43%. Angka ini merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun terakhir, baik dari sisi nilai absolut maupun persentase efektivitas terhadap target. Konsistensi Kota Blitar dalam mempertahankan skor di atas angka 80 selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa daerah ini telah berhasil menjaga stabilitas kualitas demokrasinya. Perbandingan antara skor faktual dan target RPJMD 2023-2025 mengonfirmasi bahwa Kota Blitar tidak hanya sekadar memenuhi standar minimal demokrasi, tetapi secara konsisten melampaui target pembangunan politik yang telah ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah.

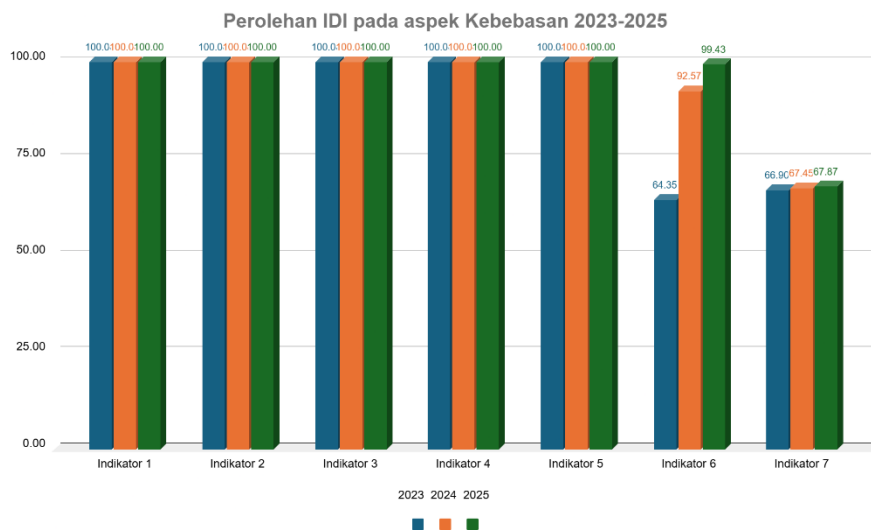
4.3 Perolehan IDI Berdasarkan Indikator Komposit Masing-Masing Aspek

Analisis mendalam terhadap variabel kualitas demokrasi di Kota Blitar selama periode 2023-2025 menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama pada Aspek Kebebasan. Sebagai pilar pertama dalam struktur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), aspek ini berfungsi sebagai barometer perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Perolehan angka pada tahun 2025 ini menunjukkan signifikansi yang mendalam, terutama jika ditinjau dari tiga aspek fundamental: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Aspek/Indikator	Skor 2023	Skor 2024	Skor 2025	Nilai AHP	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	aggregate (2023)	Aggregate (2024)	Aggregate (2025)
Aspek kebebasan										
Indikator 1	100.00	100.00	100.00	0.161	0	0.5	0.00	16.10	16.10	16.10
Indikator 2	100.00	100.00	100.00	0.125	0	0.2	0.00	12.50	12.50	12.50
Indikator 3	100.00	100.00	100.00	0.175	0	0.3	0.00	17.50	17.50	17.50
Indikator 4	100.00	100.00	100.00	0.156	0	100	0.00	15.60	15.60	15.60
Indikator 5	100.00	100.00	100.00	0.126	0	0.2	0.00	12.60	12.60	12.60
Indikator 6	64.35	92.57	99.43	0.115	0.3	0	0.30	7.40	10.65	11.43
Indikator 7	66.90	67.45	67.87	0.142	100	0	67.87	9.50	9.58	9.64
<i>Skor Aspek Kebebasan</i>								91.20	94.52	95.37
Aspek kesetaraan										
Indikator 8	67.59	90.20	90.20	0.108	75.83	0	68.40	7.30	9.74	9.74
Indikator 9	100.00	40.00	40.00	0.122	0.5	0	0.20	12.20	4.88	4.88
Indikator 10	5.20	72.67	66.83	0.173	7	1	5.01	0.90	12.57	11.56
Indikator 11	89.89	96.49	82.95	0.188	100	0	82.95	16.90	18.14	15.59
Indikator 12	72.09	66.83	95.67	0.129	100	0	95.67	9.30	8.62	12.34
Indikator 13	87.86	97.86	98.61	0.14	100	0	98.61	12.30	13.70	13.81
Indikator 14	92.75	92.44	94.89	0.138	100	0	94.89	12.80	12.76	13.10
<i>Skor Aspek Kesetaraan</i>								71.70	80.41	81.02
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi										
Indikator 15	61.54	58.33	100.00	0.104	100	0	100.00	6.40	6.07	10.40
Indikator 16	95.95	100.61	95.49	0.148	100	0	95.49	14.20	14.89	14.13
Indikator 17	129.10	100.00	100.00	0.134	0	2	0.00	17.30	13.40	13.40
Indikator 18	197.89	100.00	100.00	0.095	0	2	0.00	18.80	9.50	9.50
Indikator 19	69.92	64.94	67.33	0.123	100	0	67.33	8.60	7.99	8.28
Indikator 20	106.06	100.00	100.00	0.132	100	0	100.00	14.00	13.20	13.20
Indikator 21	3.75	90.40	93.80	0.16	5	0	4.69	0.60	14.46	15.01
Indikator 22	100.00	129.17	82.86	0.103	5	0	4.14	10.30	13.30	8.53
<i>Skor Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</i>								90.20	92.81	92.46

Jika membandingkan data 2025 dengan dua tahun sebelumnya, terlihat adanya pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Perolehan IDI pada tahun 2025 adalah pembuktian keberlanjutan (*sustainability*) dari kondisi demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya. Angka tahun 2025 signifikan bukan karena kenaikannya yang drastis, melainkan karena kemampuannya mempertahankan standar kualitas di tengah tantangan sosial-ekonomi yang dinamis.

4.3.1 Aspek Kebebasan



Berdasarkan data riset yang dilakukan, aspek kebebasan diukur melalui tujuh indikator komposit yang mencakup spektrum luas, mulai dari ekspresi keyakinan personal hingga perlindungan institusional terhadap keyakinan. Secara umum, skor aspek Kebebasan Kota Blitar bergerak dari angka 91,20 pada tahun 2023, meningkat menjadi 94,52 pada 2024, dan sedikit terkoreksi meningkat kembali di angka 95,37 pada tahun 2025.

Indikator pertama hingga kelima secara konsisten menunjukkan performa yang solid di Kota Blitar. Indikator 1 (jaminan kebebasan oleh aparat negara) dan Indikator 2 (jaminan kebebasan antar masyarakat), Indikator 3 (Kebebasan Berkeyakinan), Indikator 4 (perlindungan kebebasan pada kebijakan), dan Indikator 5 (hak memilih dan dipilih) mencatatkan skor maksimal 100 poin. Skor tersebut didapatkan lantaran tidak terdapat catatan pelanggaran atau kejadian pada masing-masing indikator.

Hal ini merefleksikan konsistensi Pemerintah Kota Blitar memberikan jaminan hak untuk berkeyakinan dan berpendapat melalui regulasi yang menjamin keamanan baik dari aparat maupun antar masyarakat sendiri. Signifikansi angka ini menunjukkan bahwa iklim dialogis di Kota Blitar telah terlembagakan dengan baik, di mana warga tidak merasa terancam secara fisik maupun hukum saat menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Dalam perspektif teori demokrasi liberal, stabilitas pada indikator ini adalah prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sipil yang kuat (*strong civil society*).

Hal ini merefleksikan profesionalisme aparat keamanan lokal dalam menangani aksi-aksi massa atau ketertiban umum, yang secara langsung memperkuat legitimasi negara di mata warga.

Meski demikian, terdapat dua indikator pada aspek Kebebasan yang harus diperhatikan; Indikator 6 (Pemenuhan hak-hak pekerja) dan Indikator 7 (Kebebasan Pers). Meski Indikator 6 mencatat mengalami peningkatan signifikan, dari skor 64,35 pada tahun 2023, kemudian mengalami lonjakan menjadi 92,57 pada tahun 2024, dan mendapat nilai hampir sempurna menjadi 99,43 pada 2025 ini. Perolehan skor ini dapat dianalisis melalui jaminan pada pekerja yang disediakan oleh pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan data Sakernas per Agustus 2024, BPS Kota Blitar mencatat terdapat 29,83 persen pekerja (dengan status buruh/karyawan/pegawai/pekerja bebas) yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian pada tahun 2024. Angka tersebut sudah mencapai titik ideal 30 persen jumlah pekerja yang dijamin hak dasarnya berdasarkan penilaian AHP di riset IDI. Artinya, jika pada tahun berikutnya terjadi peningkatan lebih dari 30 persen, maka skor pada indikator 6 ini pasti akan kembali naik dan melebihi angka 100 persen.

Perolehan skor yang tak kalah menarik terjadi pada Indikator 7 (Kebebasan Pers). Pada tahun 2023, indikator ini berada pada angka 66,9, meningkat menjadi 67,45 pada 2024, namun mengalami stagnasi atau kenaikan tipis menjadi 67,80 pada tahun 2025. Perolehan angka pada indikator Pers yang bebas menjalankan fungsinya ini diambil dari laporan Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Provinsi Jawa Timur yang dilarsir Dewan Pers. Kebergantungan data pada IKP dari Dewan Pers yang tidak mencakup level Kota tentu harus diperhatikan secara hati-hati. Artinya,

betapa praktik pers yang sehat di Kota Blitar tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan skor pada indikator 7 ini. Meskipun pers dan pemerintah daerah telah berupaya menyediakan dan memberikan jaminan kebebasan melalui pers yang sehat, perolehan IKP pada tingkat provinsi pada 2023 hingga 2025 yang tidak lebih dari 70 turut memberikan tekanan pada skor IDI.

Jika dilakukan perbandingan proporsional, tahun 2025 aspek Kebebasan mencapai titik puncak, bukan hanya karena indikator satu hingga 5 mendapat poin maksimal, tapi juga karena terdapat peningkatan signifikan pada

indikator 6. Performa pada tahun 2025 memberikan sinyal positif mengenai keberlanjutan kualitas demokrasi. Sedangkan stagnasi poin pada indikator ke-7 secara akumulatif memberikan sedikit tekanan dan menahan skor aspek kebebasan untuk mendapat poin lebih maksimal.

Pemerintah Kota Blitar tidak boleh hanya puas dengan skor tinggi pada indikator kebebasan tradisional. Fokus pada tahun-tahun mendatang harus diarahkan pada stabilitas masing-masing indikator agar tetap konsisten pada angka yang didapatkan. Perolehan angka di tahun 2025 harus dijadikan momentum untuk melakukan penguatan kembali pada jaminan kebijakan yang dilakukan oleh semua pihak; baik aparat keamanan, masyarakat yang toleran, hingga pemerintah daerah melalui kebijakan sosial yang inklusif.

4.3.2 Aspek Kesetaraan



Kesetaraan dalam kerangka IDI bukan hanya soal kesamaan di hadapan hukum, melainkan sejauh mana negara melakukan intervensi aktif untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal (*no one left behind*). Di Kota Blitar, transisi dari tahun 2023 (Biru) ke 2025 (Hijau) menunjukkan pergeseran paradigma dari pemenuhan hak-hak formal menuju penguatan kapasitas warga. Berdasarkan data diagram yang tersaji, secara umum perolehan skor pada masing-masing indikator dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hanya indikator 10 (anti monopoli) dan indikator 11 (perlindungan jaminan sosial) yang sedikit mengalami penurunan. Secara fundamental, aspek ini mengukur sejauh mana negara mampu menjamin

distribusi hak dan sumber daya yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Aspek Kesenjangan di Kota Blitar dibentuk oleh serangkaian indikator yang mencerminkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan partisipasi. Pada indikator 8 yang mengukur pemberdayaan gender (IDG) yang mengukur sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada 2025 ini, data IDG masih belum tersedia dan baru akan dipublikasikan pada Mei 2025. Sehingga, pada 2025 masih menggunakan data yang tersedia pada tahun sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui, IDG 2024 tercatat sebesar 68,4. Angka tersebut sedikit di bawah batas ideal yang ditetapkan IDI yaitu sebesar 75,83, sehingga indikator 8 ini mendapat skor 90,2 poin. Jika peningkatan konsisten ini dipertahankan, nilai ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap kesetaraan bagi perempuan di ranah ekonomi dan politik tidak lagi sekadar pemenuhan administratif, tetapi telah menyentuh aspek yang setara bagi setiap warga.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada indikator 9 tentang keterlibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan publik. Pada 2025 ini, data dari Sekretariat Dewan (Sekwan) mencatatkan lima jumlah kegiatan hearing yang melibatkan publik. Data ini tercatat sama seperti tahun sebelumnya. Idealnya, jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam keputusan ini dilakukan 50% dari total jumlah kursi DPRD. Jika terdapat 25 kursi, maka nilai idealnya adalah 12-13 kegiatan.

Signifikansi kenaikan skor pada Indikator 10 dari 5,2 di tahun 2023 menjadi 72,67 pada 2024 dan sedikit menurun jadi 66,83 di tahun 2025 menunjukkan penguatan mekanisme antimonopoli sumber daya ekonomi di Kota Blitar yang berkorelasi positif dengan perbaikan Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur. Secara akademik, peningkatan skor ini mengindikasikan bahwa struktur pasar lokal semakin kompetitif dan terbuka, yang secara langsung mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir elit atau praktik oligarki ekonomi. Dalam perspektif demokrasi, distribusi sumber daya ekonomi yang lebih merata merupakan prasyarat krusial bagi kesetaraan politik; ketika akses terhadap sumber daya ekonomi tidak lagi dimonopoli, maka hambatan bagi aktor-aktor baru untuk berpartisipasi dalam ruang publik

dan kontestasi politik menjadi berkurang, sehingga menciptakan level bermain yang lebih adil bagi seluruh warga negara. Meski demikian, data Indeks Persaingan Usaha dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur menjadi catatan data yang perlu diperhatikan lebih jauh oleh Pemerintah Kota Blitar.

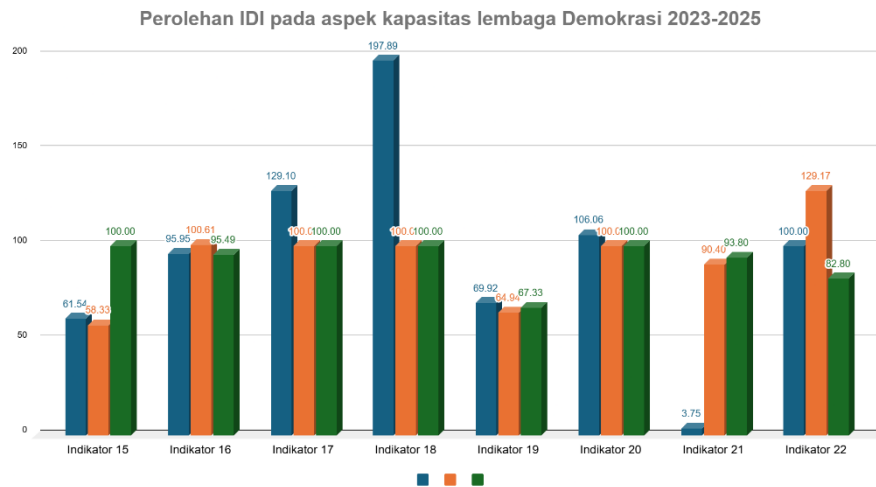
Sementara itu, Indikator 11 juga mencatatkan penurunan. Perolehan skor sebesar 96,49 pada 2024 dan turun menjadi 82,95 pada 2025 sebenarnya bukan pada sedikitnya jumlah bantuan dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin Kota Blitar dari kondisi Maret 2024 yang sebesar 9,86 ribu jiwa (6,75%) menjadi 9,69 ribu jiwa atau sekitar 6,60% pada 2025. Jumlah ini berkurang sebesar 0,17 ribu jiwa (turun 0,15% poin). Berdasarkan catatan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, terdapat beberapa bantuan yang diberikan secara periodik yang sama-sama menyasar kelompok masyarakat miskin. Di antara Bantuan Sosial (Bansos) Reguler dari Dinsos sepanjang 2025 adalah:

- Rastrada non Tunai Triwulan IV 2025 menyasar 7616 KPM
- PKH periode Okt-Des 2025 sejumlah 5274 KPM
- Sembako/BPNT Periode Okt-Des 2025 sejumlah 8038 KPM
- Yapi (daerah) Periode semester 2 tahun 2025 sejumlah 498 anak

Meskipun Pemerintah Kota Blitar telah menyalurkan bantuan pada seluruh warga miskin dan melakukan verifikasi untuk menghindari kesalahan kelompok sasaran, sayangnya data jumlah penduduk miskin sebanyak 9,69 ribu jiwa menjadi data dasar pembagi. Jadi, melalui data dari Dinsos misalnya, hanya mengambil data penerima Sembako/BNPT yang menyasar sejumlah 8038 Kelompok Penerima Manfaat.

Secara teoretis, pencapaian ini merupakan perwujudan dari keadilan distributif; demokrasi dianggap berkualitas bukan hanya ketika warga memiliki hak pilih, tetapi ketika negara hadir menjamin hak-hak dasar kelompok paling marginal. Keberhasilan mempertahankan skor di atas 80 pada tahun 2025 mempertegas bahwa inklusivitas sosial di Kota Blitar telah mencapai tahap konsolidasi yang matang, di mana perlindungan terhadap warga miskin menjadi prioritas kebijakan yang terinstitusi.

4.3.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi



Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada aspek kapasitas lembaga demokrasi periode 2023 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif namun cenderung menunjukkan penguatan pada beberapa indikator krusial. Dalam kajian demokrasi, kapasitas lembaga merupakan variabel fundamental karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh partisipasi massa, tetapi juga oleh sejauh mana institusi politik mampu menjalankan fungsinya secara akuntabel dan transparan. Huntington (1991) dalam teorinya mengenai gelombang demokratisasi menekankan bahwa pelembagaan politik adalah kunci bagi stabilitas demokrasi. Data yang tersaji menggambarkan bagaimana lembaga legislatif, yudikatif, dan birokrasi di tingkat daerah berupaya menyelaraskan kinerja mereka dengan standar demokrasi yang ideal.

Dimulai dari indikator kinerja lembaga legislatif yang diukur melalui persentase peraturan daerah (Perda) yang disahkan terhadap target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), terlihat adanya anomali positif yang signifikan. Pada tahun 2023, skor berada pada angka 61.54, kemudian sedikit menurun menjadi 58.33 pada tahun 2024. Namun, lonjakan luar biasa terjadi pada tahun 2025 di mana skor mencapai angka sempurna 100.00. Hal ini tidak terlepas dari 10 Perda yang disahkan sepanjang 2024 lalu dibandingkan dengan 10 target dari Propemperda. Peningkatan ini mencerminkan adanya efektivitas kerja legislasi yang lebih terukur. Menurut Diamond (2002) ini merupakan bentuk responsivitas institusi terhadap

kebutuhan regulasi masyarakat. Kemampuan legislatur dalam memenuhi target legislasi tanpa mengabaikan kualitas adalah cerminan dari kematangan fungsi representasi.

Selaras dengan hal tersebut, kinerja lembaga yudikatif yang dipotret melalui persentase putusan terhadap beban kasus di lingkungan pengadilan tinggi menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Skor pada tahun 2023 dimulai dari 95.95, sedikit meningkat ke angka 100.61 pada 2024, sebelum akhirnya terkoreksi ke angka 95.49 pada 2025. Meskipun terjadi penurunan di tahun terakhir, angka tersebut masih tergolong tinggi dalam kategori kinerja yudisial. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Blitar, sepanjang kewenangan PN Blitar yang mencakup Kabupaten dan Kota, 2024 terdapat 8681 kasus yang masuk dan 7771 kasus tersebut telah diselesaikan. Sedangkan di pada penyelesaian kasus di Kota Blitar sendiri, PN Kota Blitar berhasil memutuskan perkara sebanyak 1376 dari 1441 total perkara yang masuk. Perkara tersebut terdiri dari pidana biasa, pidana cepat, praperadilan, pidana khusus anak, perdata gugatan, perdata permohonan, perdata gugatan sederhana, dan eksekusi. Kemampuan pengadilan untuk menyelesaikan beban kasus secara tepat waktu merupakan manifestasi dari prinsip *rule of law*. Sebagaimana ditegaskan oleh O'Donnell (2004), akuntabilitas horizontal yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap kekuasaan lain hanya dapat berjalan efektif jika lembaga tersebut memiliki kapasitas internal yang kuat untuk menyelesaikan perkara hukum yang ada.

Aspek netralitas penyelenggara pemilu dan kepatuhan terhadap hukum juga menjadi sorotan dalam data ini. Indikator ke-17 mengenai netralitas penyelenggara pemilu di tingkat Kota Blitar menunjukkan skor yang stabil di angka 100.00 pada dua tahun ini (2024-2025). Hal ini menandakan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap netralitas penyelenggara pemilu berjalan dengan baik. Netralitas merupakan prasyarat mutlak bagi integritas pemilu. Mietzner (2013) berpendapat bahwa di Indonesia, independensi lembaga penyelenggara pemilu sering kali menjadi benteng terakhir dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil kontestasi politik yang kompetitif.

Lebih lanjut, indikator ke-18 yang mengukur jumlah kebijakan pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyajikan angka yang cukup baik dalam dua tahun terakhir.

Skor ini stabil di angka 100.00. Penguatan peran PTUN dalam membatalkan keputusan pejabat publik yang sewenang-wenang adalah bagian dari mekanisme yang memastikan keadilan bagi masyarakat melalui lembaga demokrasi seperti Pengadilan. Idealnya, indikator 17 dan 18 tersebut tidak mencatatkan satu kasus atau kesalahan kecurangan maupun bentuk kebijakan pemerintah yang digugat.

Namun, tantangan besar masih terlihat pada indikator ke-19 terkait jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Skor IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Blitar tampak stagnan di kisaran rendah, yakni 69.92 pada 2023, turun ke 64.94 pada 2024, dan hanya sedikit meningkat ke 67.33 pada 2025. Data terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar menempatkan IKLH dalam kategori sedang dengan skor 67.33. Angka tersebut tersusun dari agregat kualitas udara (70,86), kualitas air (75,10) dan kualitas tutupan lahan (46,90). Data ini menunjukkan bahwa upaya mengintegrasikan isu ekologi ke dalam kebijakan publik masih lemah. Hal ini selaras dengan kritik banyak sarjana demokrasi mengenai *green democracy* yang sering kali terabaikan demi mengejar pertumbuhan ekonomi atau efisiensi administratif singkat. Sukma (2011) menyatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia harus diukur dari kemampuannya memberikan perlindungan hak-hak dasar warga, termasuk hak atas lingkungan yang sehat.

Beranjak ke aspek transparansi, indikator ke-20 mengenai keterbukaan informasi anggaran (APBD) di dalam <https://transparansi.blitarkota.go.id/> pemerintah daerah menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan skor stabil di angka 100.00 sejak tahun 2024 setelah sebelumnya berada di 106.06 pada 2023. Upaya untuk menjamin transparansi ini dituangkan melalui Instruksi Mendagri No. 188.52/1791/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah. Kewajiban mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari Perda tentang APBD (penganggaran), Ringkasan RKA-SKPD (penganggaran), Perda tentang Perubahan APBD (penganggaran), Ringkasan DPA-SKPD (penganggaran), Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Y-1) (pelaksanaan), LKPD yang sudah audit (Y-1) (pelaporan),

dan Opini atas Laporan Keuangan (Y-1) Pemerintah Daerah (pelaporan). Ketersediaan informasi publik secara digital merupakan langkah maju dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka. Meijer (2009) menekankan bahwa transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dapat meminimalisir asimetri informasi antara pemerintah dan rakyat, sehingga ruang bagi korupsi dan nepotisme dapat dipersempit. Konsistensi skor ini mencerminkan komitmen lembaga daerah dalam menjalankan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Selanjutnya, transformasi kinerja birokrasi dalam pelayanan publik pada indikator ke-21 sudah sangat baik dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 skor indikator ini mendapat 90.40 dan terus naik menjadi 93.80 pada 2025. Loncatan ini menggambarkan adanya perubahan paradigma dalam birokrasi dari yang semula bersifat kaku dan tidak responsif menjadi lembaga yang melayani. Menurut Fukuyama (2013), kapasitas negara untuk memberikan layanan publik yang efisien adalah pondasi utama bagi legitimasi demokrasi. Tanpa birokrasi yang mampu melayani, hak-hak warga negara hanya akan menjadi sekadar konsep teoretis tanpa realisasi praktis.

Terakhir, indikator ke-22 mengenai pendidikan politik pada kader partai politik menunjukkan tren yang dinamis dengan puncaknya pada tahun 2024 sebesar 129.17, sebelum sedikit menurun ke angka 82.8 pada 2025. Persentase kegiatan kaderisasi parpol yang memiliki kursi di DPRD merupakan indikator penting bagi keberlangsungan sirkulasi elit yang berkualitas. Sepanjang 2025, sejumlah partai politik seperti yang menduduki kursi di DPRD Kota Blitar kerap menggelar kegiatan pendidikan politik dan PDI-P merupakan partai yang paling banyak memberikan pelatihan sebanyak sembilan kali sepanjang 2024 disusul PKB (8 kali), Pan (4 kali), Gerindra (3 kali), Golkar dan PPP (2 kali). Sedangkan Partai Demokrat hanya menggelar kegiatan pendidikan politik sebanyak sekali.

Sartori (2005) menyatakan bahwa partai politik adalah tulang punggung demokrasi; kegagalan partai dalam mendidik kadernya akan berakibat pada penurunan kualitas kebijakan publik di masa depan. Angka yang sempurna pada tahun politik dan sedikit menurun pada masa normal di luar Pemilu menunjukkan bahwa aktivitas kaderisasi sering kali bergantung pada momentum politik tertentu, namun capaian yang masih di atas 80 di tahun

2025 menunjukkan bahwa fungsi pendidikan politik mulai menjadi standar operasional tetap bagi partai di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, data kapasitas lembaga demokrasi pada periode 2023-2025 ini memberikan gambaran tentang sebuah sistem yang sedang berupaya mencapai titik keseimbangan. Meskipun terdapat beberapa area yang masih memerlukan perhatian serius, terutama terkait isu lingkungan dan keberlanjutan kinerja yudisial, tren peningkatan drastis pada pelayanan publik dan transparansi anggaran memberikan optimisme bagi konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Penguatan kapasitas institusional ini diharapkan tidak hanya berhenti pada angka-angka indeks, melainkan bertransformasi menjadi budaya politik yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan masyarakat luas.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Capaian IDI Kota Blitar periode 2025 sebesar 89,06 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam dua tahun terakhir, bergerak dari skor 84,37 (2023) dan 88,68 (2024). Angka ini secara konsisten melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menandai transisi Kota Blitar dari demokrasi yang bersifat prosedural menuju demokrasi yang lebih substantif, stabil, dan terinstitusionalisasi dengan baik.
2. Aspek kebebasan menunjukkan performa yang sangat solid dengan skor 95,37 pada 2025. Jaminan kebebasan berkeyakinan, keamanan dari negara, aparat, masyarakat, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta jaminan pemilu (indikator 1-5) konsisten mendapat nilai sempurna. Pada pemenuhan hak-hak pekerja (indikator 6) yang melonjak tajam nyaris sempurna (99,43). Namun, indikator kebebasan pers (indikator 7) masih mengalami stagnasi dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
3. Terjadi tren kenaikan yang membaik tahun 2025 pada aspek kesetaraan dengan skor 81,02, sedikit meningkat dari tahun 2024 sebesar 80,41 dan 2023 sebesar 71,7. Peningkatan ini dihasilkan dari kesetaraan gender (indikator 8), kesetaraan kerja, aksesibilitas informasi, dan pelayanan dasar (indikator 12-14) yang mendapat skor di atas 90 poin. Adapun partisipasi masyarakat dalam kebijakan (indikator 9) mendapatkan skor rendah hanya 40 poin. Meski demikian, secara keseluruhan aspek kesetaraan menunjukkan bahwa inklusivitas politik mengalami peningkatan, di mana kelompok marjinal dan perempuan semakin terintegrasi dalam proses kebijakan publik, mendapat akses informasi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai. Kendati demikian, skor yang masih rendah pada indikator keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah mengarahkan penguatan keterlibatan aktif masyarakat dalam kebijakan strategis yang terhubung dengan masyarakat secara langsung.
4. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi juga menampilkan performa yang stabil dalam tiga tahun terakhir dan mendapat skor 92,46 pada

2025, 92,81 pada 2024, dan 90,20 pada 2023. Kinerja legislatif (DPRD), netralitas penyelenggara pemilu, kebijakan pemerintah daerah yang dinilai salah di PTUN, serta transparansi anggaran (indikator 15, 17, 18, dan 20) mencatatkan skor sempurna (100,00). Indikator lainnya juga mendapat nilai antara 80-90 poin, kecuali jaminan pada kualitas lingkungan hidup (indikator 19) yang mendapat skor 67.33.

5.2 Saran

Berdasarkan data IDI Kota Blitar 2025, beberapa catatan saran yang dapat digunakan oleh sejumlah stakeholder untuk menjaga agar kondisi demokrasi di Kota Blitar tetap dalam performa yang baik. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan di antaranya adalah:

1. Untuk menjaga kualitas demokrasi yang tinggi dan tetap melampaui target yang ditetapkan, Pemerintah Kota Blitar harus tetap konsisten mengkoordinasikan kerja-kerja penopang indikator demokrasi bersama OPD Kota Blitar, BPS, Lembaga Yudikatif dan Legislatif, Pers, Organisasi masyarakat sipil, serta aparat yang berwenang.
2. Meskipun nilai pada aspek kebebasan sudah baik, tapi penguatan komunikasi tentang capaian jaminan kebebasan yang selama ini sangat baik harus tetap dijalankan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) agar ruang publik tidak mencapai titik jenuh dan lebih dinamis. Membuka ruang dialog dua arah ini dapat dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lapisan baik dengan media lokal, masyarakat, LSM, dan aparat untuk menciptakan iklim kebebasan yang terus dipelihara bersama.
3. Perlu upaya peningkatan pada aspek kesetaraan terutama pada pelibatan publik dalam kebijakan dengan peran DPRD dan Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan frekuensi pelibatan publik (seperti hearing) dalam setiap perumusan kebijakan. Angka ideal kegiatan pelibatan masyarakat seharusnya mencapai 50% dari total jumlah kursi DPRD (sekitar 12-13 kegiatan), sementara sepanjang 2025 baru tercatat 5 kegiatan.
4. Perolehan skor yang rendah pada aspek Kapasitas Lembaga di indikator 19 tentang jaminan pada lingkungan hidup harus diperhatikan secara penuh oleh DLH Kota Blitar. Indikator 19 pada aspek ke tiga ini

menjadi tantangan besar bagi kapasitas institusi demokrasi di Kota Blitar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar harus berupaya keras menaikkan IKL (karena hanya mendapat skor 46,9) sebagai indikator komposit IKLH selain IKA dan IKU.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond, L. (2020). Breaking out of the democratic slump. *Journal of Democracy*, 31(1), 36-56, <https://www.journalofdemocracy.org/articles/breaking-out-of-the-democratic-slump/>
- Diamond, L. (2002). Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes. *Journal of Democracy* 13(2), 21-35. <https://dx.doi.org/10.1353/jod.2002.0025>.
- Cordell, Rebecca & Dukalskis, Alex. (2024). Authoritarianism, Global Politics, and the Future of Human Rights. *International Organization*. 79. S162-S179. 10.1017/S002081832510101X
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Meijer, A. (2009). Understanding modern government: Accountability and information technology. *International Review of Administrative Sciences*, 75(2), 255–269. <https://doi.org/10.1177/0020852309104175>
- Merkel, W. (2004). Embedded and defective democracies. *Democratization*, 11(5), 33-58.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- O'Donnell, G. A. (2004). Horizontal accountability in new democracies. Dalam S. Mainwaring & C. Welna (Eds.), *Democratic accountability in Latin America* (hlm. 34–52). Oxford University Press.
- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis*. ECPR Press.
- Schedler, A. (1999). Conceptualizing accountability. Dalam A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The self-restraining state: Power and accountability in new democracies* (hlm. 13–28). Lynne Rienner Publishers.
- Sukma, R. (2011). Indonesia's democratic transition: Progress and challenges. Dalam M. Caballero-Anthony (Eds.), *Political change, democratic transitions and security in Southeast Asia* (hlm. 115–130). Routledge.

